

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN SURVEI
PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI
PONTIANAK
OKTOBER S.D DESEMBER**

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Sasaran.....	2
D. Landasan Hukum.....	2
E. Rencana Kerja.....	3
BAB II	4
METODOLOGI.....	4
A. Metode Penelitian.....	4
B. Populasi dan Sampel.....	4
C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.....	4
D. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	4
E. Teknik Analisis Data.....	4
F. Tahapan Pelaksanaan.....	5
BAB III	7
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI.....	7
A. Profil Responden.....	7
1. Tingkat Pendidikan Responden.....	7
2. Pekerjaan Responden.....	8
3. Kelompok Usia Responden.....	9
4. Jenis Layanan Responden.....	10
B. Indeks Persepsi Anti Korupsi Perindikator.....	11
1. Indikator Manipulasi Peraturan.....	11
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	12
3. Indikator Menjual Pengaruh.....	13
4. Indikator Transaksi Biaya.....	14
5. Indikator Biaya Tambahan.....	15
6. Indikator Hadiah.....	16
7. Indikator Transparansi Biaya.....	17
8. Indikator Percaloan.....	18
9. Indikator Perbuatan Curang.....	19
10. Indikator Transaksi Rahasia.....	20
C. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak.....	21
BAB IV	23
PENUTUP.....	23

A. Kesimpulan.....	21
B. Rekomendasi.....	21



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 📠 (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : pengadilannegeriptk@gmail.com

SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 📠 (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : pengadilannegeriptk@gmail.com

SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

B. Tujuan

Tujuan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai bahan untuk mempertahankan **Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi** dan peningkatan kualitas pelayanan menuju **Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**.

C. Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan system, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 📠 (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : pengadilannegeriptk@gmail.com

SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

E. Rencana Kerja

1. Persiapan dan Pengumpulan data

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penyusunan jadwal pelaksanaan survei melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER) dengan jawaban yang tersedia.
- Pelaksanaan survei melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER) dengan jawaban yang tersedia.
- Penetapan Responden adalah pengguna layanan Pengadilan Negeri Pontianak.
- Pengumpulan data terhadap 10 unsur pertanyaan, berupa jawaban melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER).

2. Pelaksanaan Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam satu tahun, survei persepsi anti korupsi ini dilaksanakan dalam interval waktu Bulan Oktober 2023 sampai Bulan Desember 2023.



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 📠 (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : pengadilannegeriptk@gmail.com

SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

BAB II

METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi Dan Sampel

Responden ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna layanan di satuan kerja Pengadilan Negeri Pontianak. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pengguna layanan dari satuan kerja Pengadilan Negeri Pontianak yang digunakan sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat terjadinya suatu peristiwa berupa pemberian layanan kepada pengguna layanan di Pengadilan Negeri Pontianak.

D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data pada penelitian ini diambil menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER) dengan populasi pada penelitian ini jumlah total keseluruhan sebanyak 61 orang responden.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi, yang menjadi mutu pelayanan Pengadilan Negeri Pontianak.



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 📠 (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : pengadilannegeriptk@gmail.com

SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

Skala indeks persepsi korupsi tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

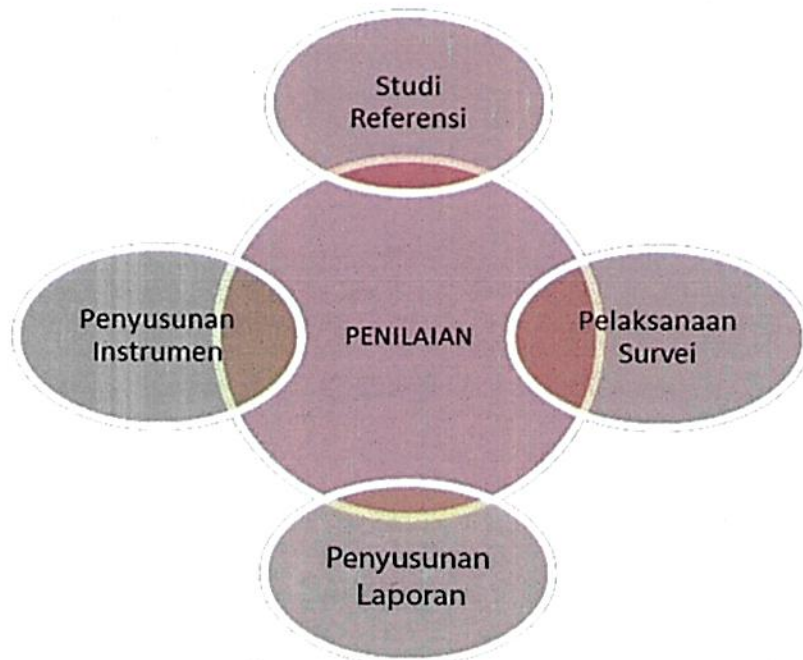
F. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan

Survei Persepsi Anti Korupsi menuju Zona Integritas





PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 📠 (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : pengadilannegeriptk@gmail.com

SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

Tabel 2

Ruang lingkup Survei Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi



BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. Profil Responden

1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengguna layanan di Pengadilan Negeri Pontianak sebanyak 61 orang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 26 orang, Diploma 3 sebanyak 4 orang, SMU sebanyak 31 orang,. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

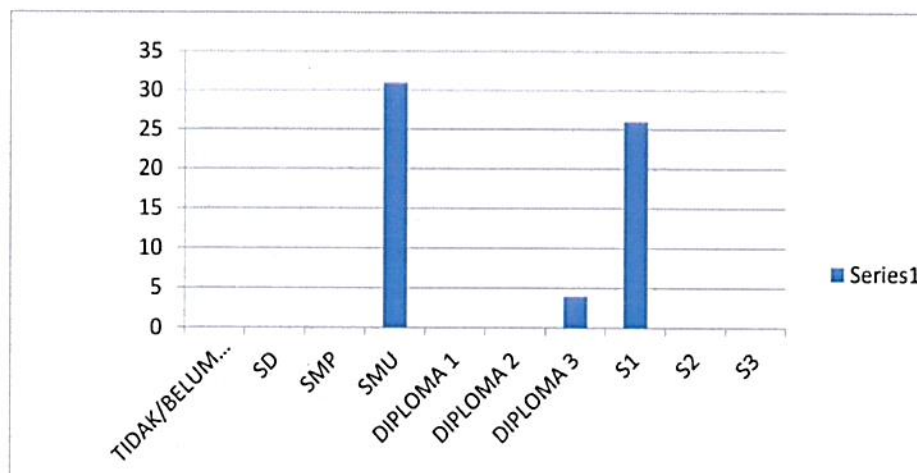
Tabel 1

Tingkat Pendidikan Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Presentase
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	0	0,00
2	SD	0	0,00
3	SMP	0	0,00
4	SMU	31	50,82
5	DIPLOMA 1	0	0,00
6	DIPLOMA 2	0	0,00
7	DIPLOMA 3	4	6,56
8	S1	26	42,62
9	S2	0	0,00
10	S3	0	0,00
Jumlah		61	100

Grafik 1

Tingkat Pendidikan Responden



Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 📠 (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : pengadilannegeriptk@gmail.com

SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Pontianak, sebanyak 11 orang responden memiliki pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara, sebanyak 1 orang pekerjaan Polri, sebanyak 21 orang pekerjaan swasta, sebanyak 3 orang pekerjaan wirausaha, sebanyak 1 orang pekerjaan tenaga kontrak dan sebanyak 24 orang pekerjaan lainnya. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

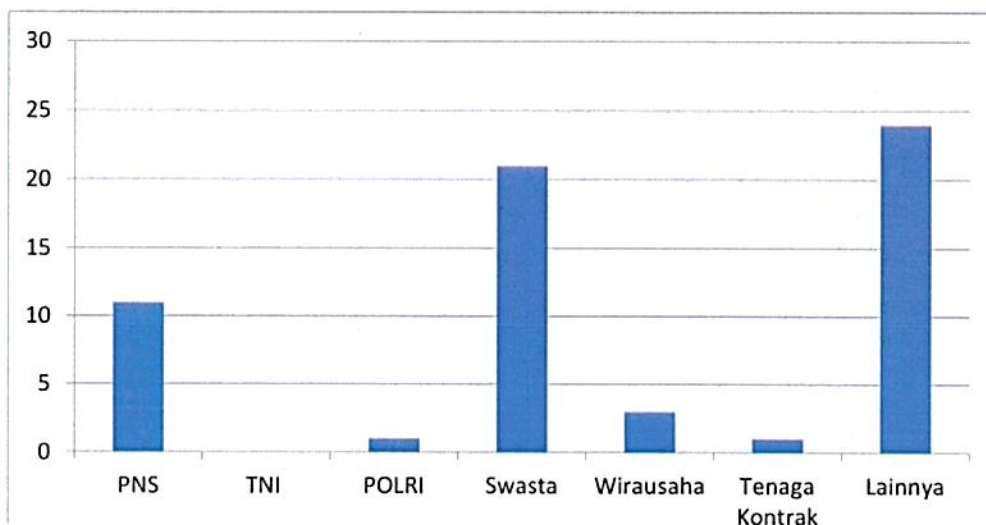
Tabel 2

Jenis Pekerjaan Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
1	PNS	11	18,03
2	TNI	0	0
3	POLRI	1	2
4	Swasta	21	34,43
5	Wirausaha	3	4,92
6	Tenaga Kontrak	1	1,64
7	Lainnya	24	39,34
Jumlah		61	100

Grafik 2

Jenis Pekerjaan Responden



Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)



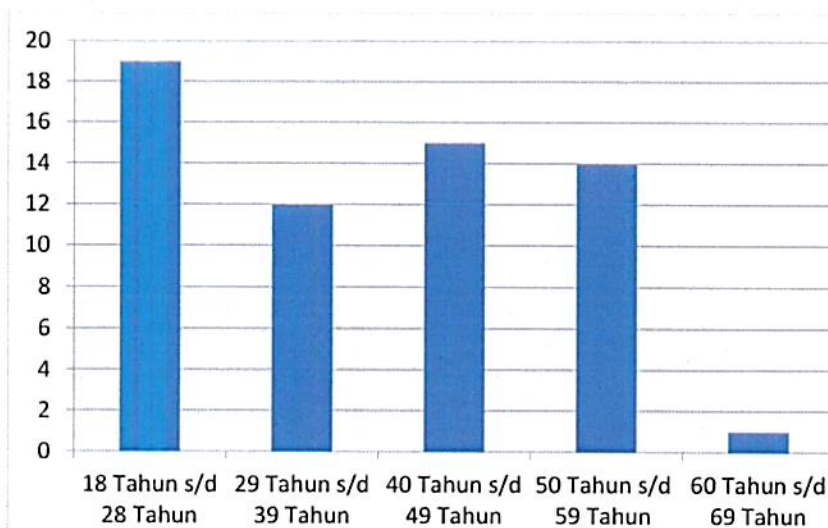
3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa pengguna layanan berada dalam kelompok usia antara 18 tahun sampai dengan 69 tahun. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3
Jenis Usia Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Presentase
1	18 Tahun s/d 28 Tahun	19	31,15
2	29 Tahun s/d 39 Tahun	12	19,67
3	40 Tahun s/d 49 Tahun	15	24,59
4	50 Tahun s/d 59 Tahun	14	22,95
5	60 Tahun s/d 69 Tahun	1	1,64
Jumlah		61	100

Grafik 3
Jenis Usia Responden



Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 📠 (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : pengadilannegeriptk@gmail.com

SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

4. Jenis Layanan Responden

Layanan PTSP terbagi menjadi 7 (tujuh) jenis layanan, sebanyak 9 orang responden menerima layanan pidana, sebanyak 9 orang responden menerima layanan Perdata, sebanyak 3 orang responden menerima layanan Hukum/Informasi, sebanyak 32 orang responden menerima layanan Administasi Umum, sebanyak 3 orang responden menerima layanan PHI, sebanyak 2 orang responden menerima layanan Tipikor, dan sebanyak 3 orang responden menerima layanan e-Court. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4
Jenis Layanan Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
1	Layanan Pidana	9	15
2	Layanan Perdata	9	14,75
3	Layanan Hukum/Informasi	3	4,92
4	Layanan Administrasi Umum	32	52,46
5	Layanan PHI	3	5
6	Layanan Tipikor	2	3,28
7	Layanan e-Court	3	5
8	Layanan Perikanan	0	0
Jumlah		61	100



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A
Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak
☎ (0561)734100 📠 (0561) 763214 / 763196
www.pn-pontianak.go.id
Email : pengadilannegeriptk@gmail.com
SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

Grafik 4

Jenis Layanan Responden

1	Layanan Pidana	9	15
2	Layanan Perdata	9	14,75
3	Layanan Hukum/Informasi	3	4,92
4	Layanan Administrasi Umum	32	52,46
5	Layanan PHI	3	5
6	Layanan Tipikor	2	3,28
7	Layanan e-Court	3	5
8	Layanan Perikanan	0	0
Jumlah		61	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

B. Indeks Persepsi Anti Korupsi Perindikator

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 1

Indeks pada indikator Manipulasi Peraturan

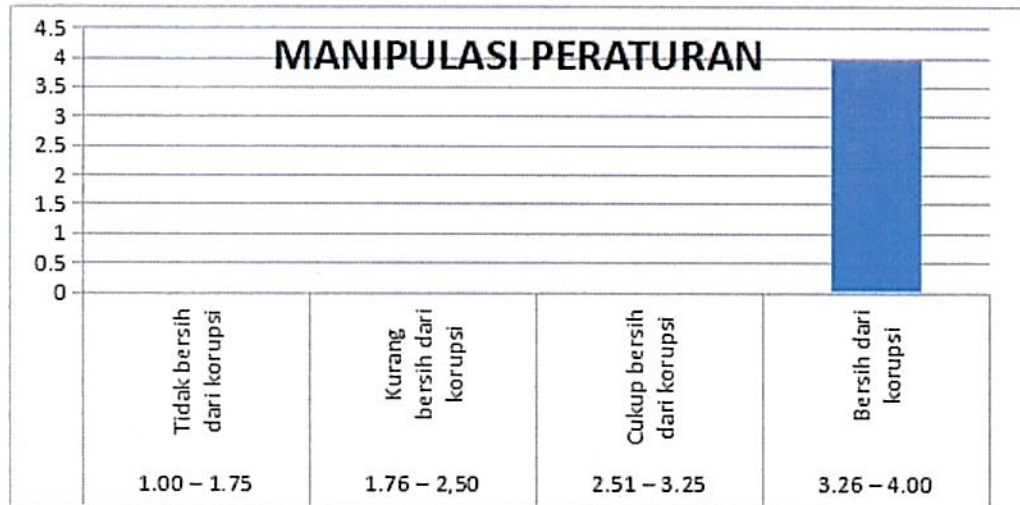
No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak sesuai prosedur	1	0	0,00
2	Jarang sesuai prosedur	2	0	0,00
3	Sering sesuai prosedur	3	0	0,00
4	Selalu sesuai prosedur	4	61	100,00
Jumlah			61	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 1

Indeks pada indikator Manipulasi Peraturan



2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 2

Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan

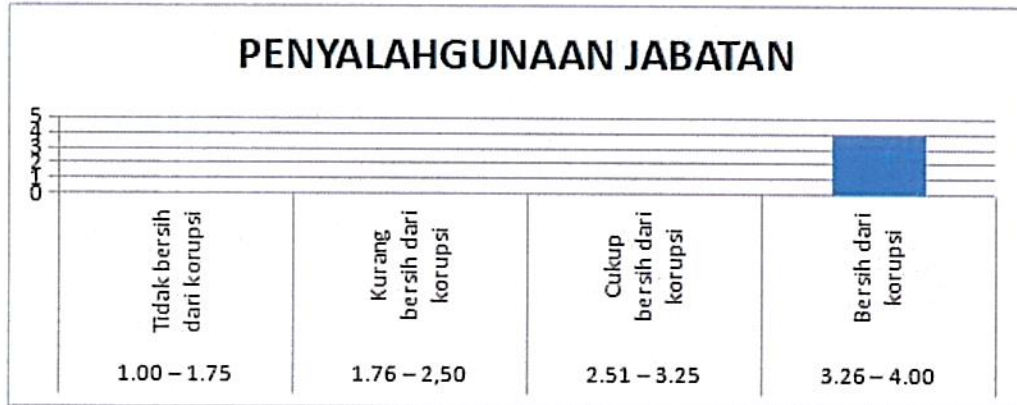
No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Petugas melayani selalu meminta imbalan	1	0	0,00
2	Petugas melayani sering meminta imbalan	2	0	0,00
3	Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	0	0,00
4	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	61	100,00
Jumlah			61	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 2

Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan



3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari pengaruh pengurusan surat/berkas perkara.

Tabel 3

Indeks pada indikator Menjual Pengaruh

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0,00
2	Sering	2	0	0,00
3	Jarang	3	0	0,00
4	Tidak ada	4	61	100,00
Jumlah			61	100

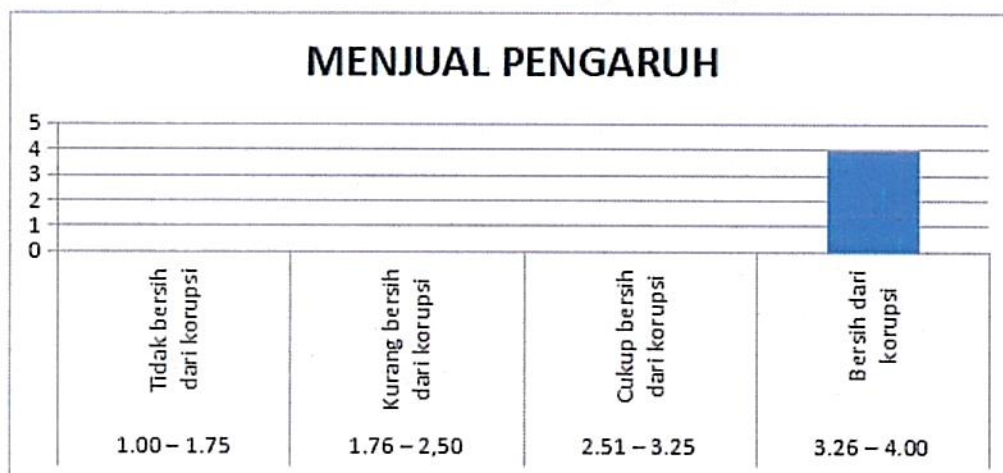
Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam

grafis berikut ini.

Gambar 3

Indeks pada indikator Menjual Pengaruh



4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari Korupsi dalam hal Transaksi Biaya.

Tabel 4

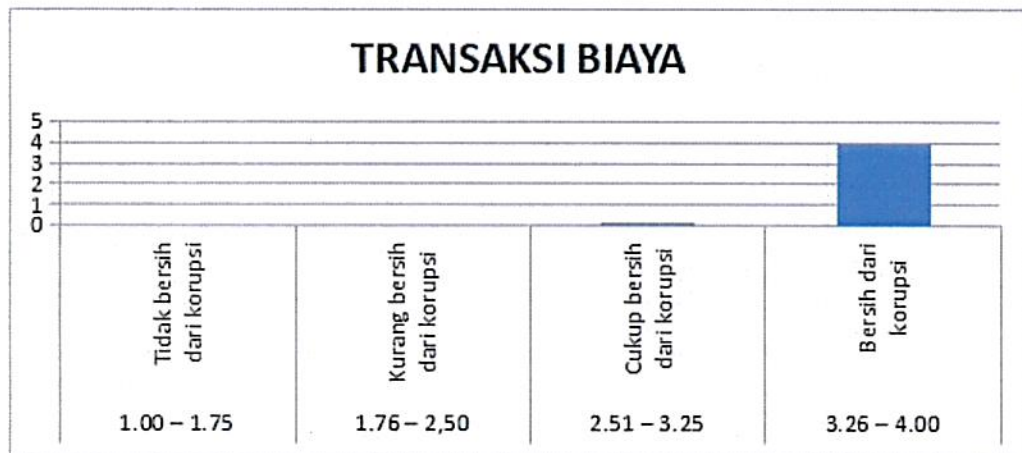
Indeks pada indikator Transaksi Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	1	0	0,00
2	Jarang	2	0	0,00
3	Sering	3	0	0,00
4	Selalu	4	61	100,00
Jumlah			61	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 4
Indeks pada indikator Transaksi Biaya



5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari Biaya Tambahan.

Tabel 5
Indeks pada indikator Biaya Tambahan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	1	0	0,00
2	Jarang	2	0	0,00
3	Sering	3	0	0,00
4	Selalu	4	61	100,00
Jumlah			61	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 📠 (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : pengadilannegeriptk@gmail.com

SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 5

Indeks pada indikator Biaya Tambahan



6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari penerimaan Hadiah.

Tabel 6

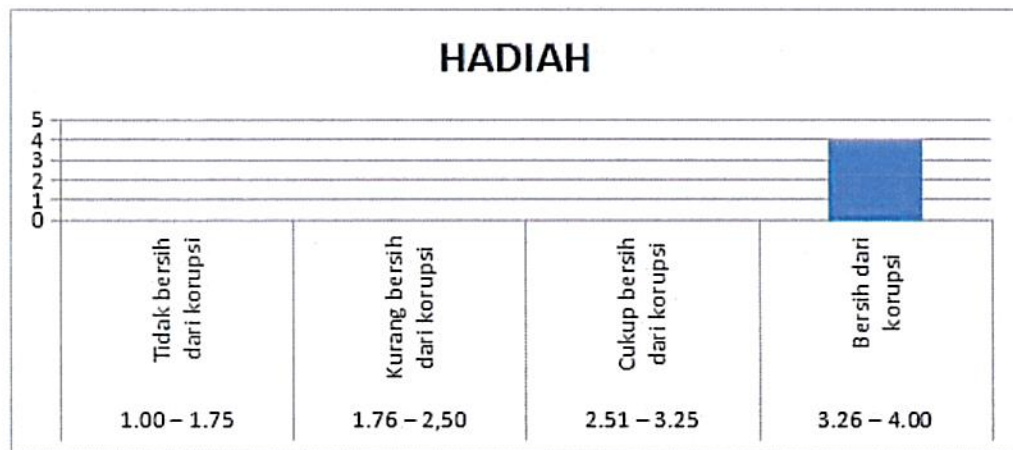
Indeks pada indikator Hadiah

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0,00
2	Sering	2	0	0,00
3	Jarang	3	0	0,00
4	Tidak ada	4	61	100,00
Jumlah			61	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 6
Indeks pada indikator Hadiah



7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari korupsi dalam memberikan Transparansi Biaya.

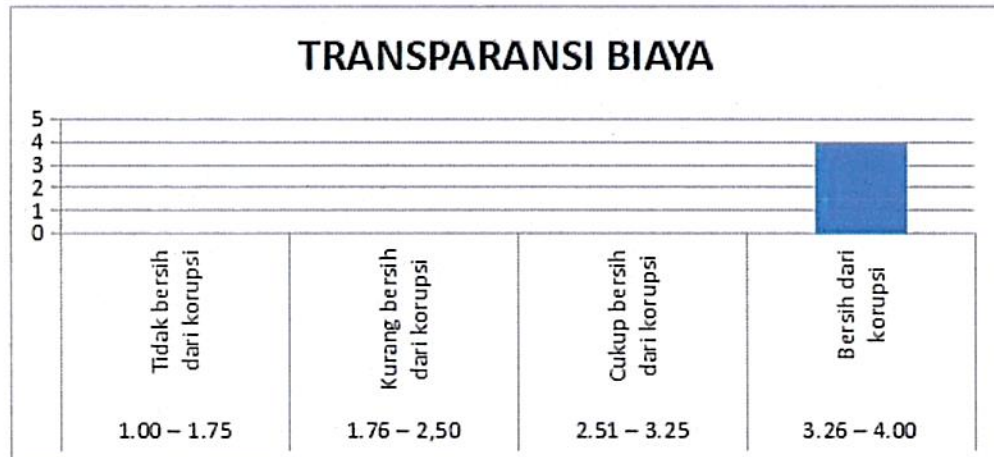
Tabel 7
Indeks pada indikator Transparansi Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	1	0	0,00
2	Jarang	2	0	0,00
3	Sering	3	0	0,00
4	Selalu	4	61	100,00
Jumlah			61	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 7
Indeks pada indikator Transparansi Biaya



8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari tindakan Percaloan.

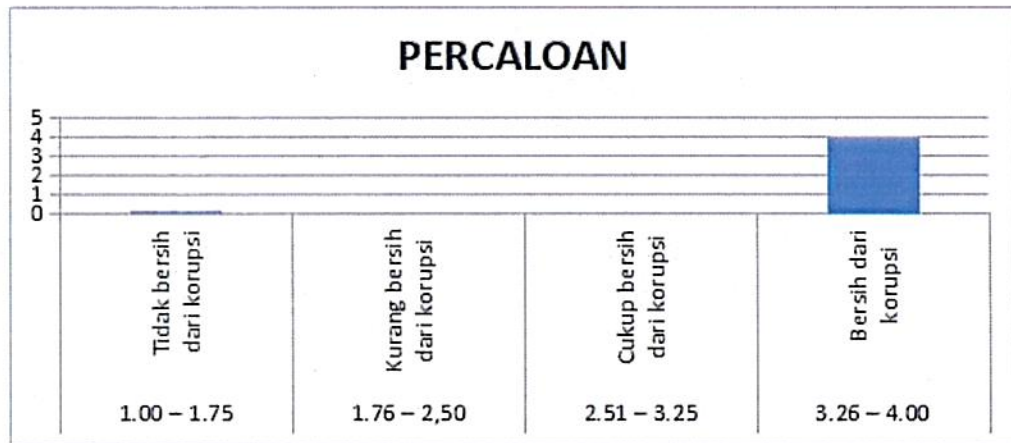
Tabel 8
Indeks pada indikator Percaloan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0,00
2	Sering	2	0	0,00
3	Jarang	3	0	0,00
4	Tidak Ada	4	61	100,00
Jumlah			61	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 8
Indeks pada indikator Percaloan



9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari Perbuatan Curang.

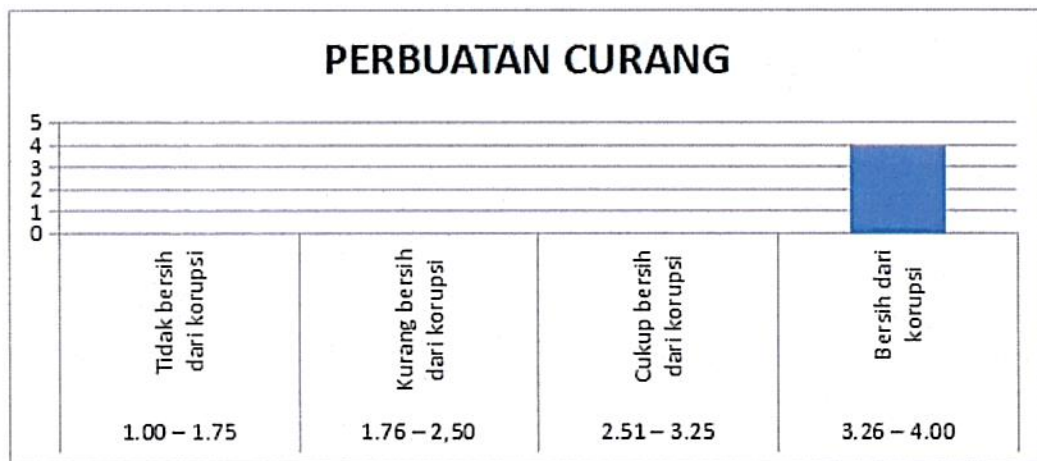
Tabel 9
Indeks pada indikator Perbuatan Curang

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0,00
2	Sering	2	0	0,00
3	Jarang	3	0	0,00
4	Tidak Ada	4	61	100,00
Jumlah			61	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 9
Indeks pada indikator Perbuatan Curang



10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari Transaksi Rahasia.

Tabel 10
Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0,00
2	Sering	2	0	0,00
3	Jarang	3	0	0,00
4	Tidak Ada	4	61	100,00
Jumlah			61	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 📠 (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

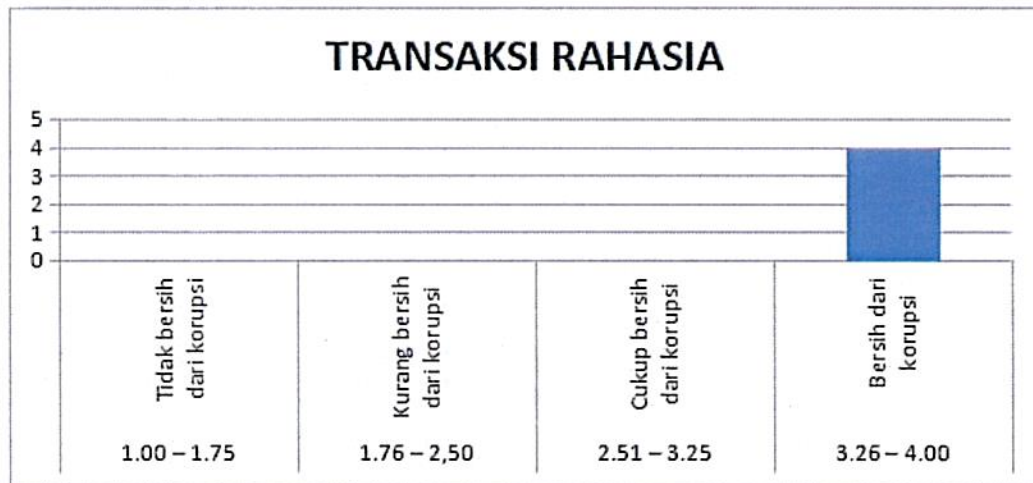
Email : pengadilannegeriptk@gmail.com

SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 10

Tabel indeks pada indikator Transaksi Rahasia



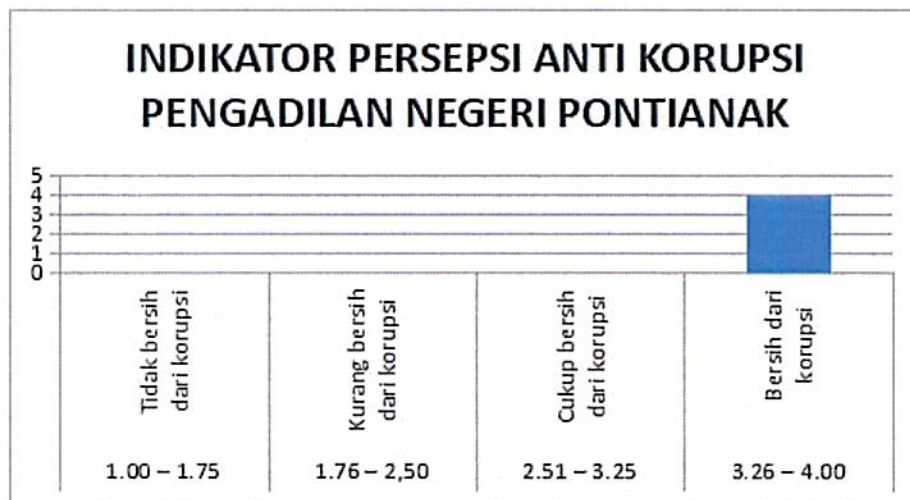
C. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak sebesar 4/99,94%

Tabel 11

Indeks Persepsi Anti Korupsi

Pengadilan Negeri Pontianak



Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81.26 – 100.00.



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 📠 (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : pengadilannegeriptk@gmail.com

SIPP Address : sipp.pn-pontianak.go.id

Tabel 12

**Indek Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Negeri Pontianak**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Pontianak diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Pontianak memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 4/100,00% atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pontianak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 tersebut, menunjukkan mayoritas indikator memiliki indeks 4,00 atau masuk pada persepsi **Bersih dari Korupsi**. Perlu dipertahankan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik serta komitmen Pengadilan Negeri Pontianak untuk menuju **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
 Jl. Sultan Abdurrahman No. 89 KOTA PONTIANAK
 KALIMANTAN BARAT
<http://pn-pontianak.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
 Periode 1 Oktober 2023 sampai 31 Desember 2023

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

4,00 / 100,00%

Jumlah	61 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 34 PEREMPUAN : 27	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 4 SMP : 0 S1 : 26 SMU : 31 S2 : 0 Diploma 1 : 0 S3 : 0	
Pekerjaan	PNS : 11 SWASTA : 21 TNI : 0 WIRUSAHA : 3 POLRI : 1 TENAGA KONTRAK : 1 LAINNYA : 24	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	4,000
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	4,000
3. Apakah pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	4,000

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Terkait indikator manipulasi peraturan, Petugas pelayanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menyampaikan peraturan dan persyaratan layanan dengan baik sesuai aturan yang berlaku kepada pengguna layanan. Serta agar seluruh petugas pelayanan tetap mempertahankan kinerja yang baik dalam melayani pengguna layanan
2. Terkait indikator penyalahgunaan jabatan, pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak ditemukan adanya penyalahgunaan jabatan. Petugas layanan dan ASN selalu bertindak sesuai dengan aturan, tugas dan fungsinya dalam melayani pengguna layanan. Serta agar seluruh petugas pelayanan tetap mempertahankan kinerja yang baik dalam melayani pengguna layanan.
3. Terkait indikator menjual pengaruh, pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak ditemukan adanya tindakan petugas layanan dan ASN yang menjual pengaruh kepada pengguna layanan. Seluruh pengguna layanan dilayani sesuai dengan aturan, tugas dan fungsinya. Serta agar seluruh petugas pelayanan tetap mempertahankan kinerja yang baik dalam melayani pengguna layanan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

3 Januari 2024
 Ketua Pengadilan Negeri